TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELAYARAN MENANGKAP IKAN DI HARI JUM'AT STUDI DI DESA TABUYUNG KECAMATAN MUARA BATANG GADIS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Oleh :

MIKO AMANDA
NIM. 1910700002

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELAYARAN MENANGKAP IKAN DI HARI JUM'AT STUDI DI DESA TABUYUNG KECAMATAN MUARA BATANG GADIS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Oleh :

MIKO AMANDA
NIM. 1910700002

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELAYARAN MENANGKAP IKAN DI HARI JUM'AT STUDI DI DESA TABUYUNG KECAMATAN MUARA BATANG GADIS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Oleh :

MIKO AMANDA
NIM. 1910700002

PEMBIMBING I

Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. **Miko Amanda**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksamplar

Padangsidimpuan, 10 Januari 2024

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi **Miko Amanda** berjudul **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelayaran Menangkap Ikan Di Hari Jum'at Studi Di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skrispinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Miko Amanda
NIM	:	1910700002
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelayaran Menangkap Ikan Di Hari Jum'at Studi Di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 07 Desember 2023



Miko Amanda
NIM. 1910700002

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miko Amanda

NIM : 1910700002

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelayaran Menangkap Ikan Di Hari Jum'at Studi Di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis"**. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 07 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Miko Amanda

NIM. 1910700002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website : https://fasih.uinsyahada.ac.id Email : fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Miko Amanda
NIM : 1910700002
Judul Skripsi :Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelayaran Menangkap Ikan Di Hari Jum'at Studi Di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 08 Desember 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai.
Hasil/ Nilai : 76, (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,50 (Tiga Koma Lima Puluh)
Predikat : Pujian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 212 /Un.28/D/PP.009/02/2024

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelayaran Menangkap Ikan Di Hari Jumat Studi Di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis

NAMA : Miko Amanda
NIM :1910700002

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 29 Februari 2024
Dekan

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : **Miko Amanda**
NIM : **1910700002**
Judul Skripsi :***Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelayaran Menangkap Ikan Di Hari Jum'at Studi Di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis***
Tahun : **2023**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah ***tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pelayaran menangkap ikan di hari jum'at studi di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pelayaran menangkap ikan di hari jum'at. Dengan rumusan masalah b***agaimana sanksi menangkap ikan di hari Jum'at di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis dan bagaimana Tinjaun Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pelayaran Menangkap Ikan di Hari Jum'at Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis serta apa nilai-nilai yang terdapat di larangan menangkap ikan di Hari Jum'at.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriftif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini adalah Hukuman bagi pelaku tindak pelayaran menangkap ikan di hari jum'at adalah mengambil semua hasil tangkapan kapal. Bahwa jika di tinjau dari Hukum Pidana Islam sanksi yang di berikan kepada sipelaku terhadap sanksi pelayaran menangkap ikan di hari jum'at adalah *jarimah ta'zir*, yang dimana *jarimah ta'zir* tersebut berupa bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *walliyul amri* atau hakim. Menurut Ahmad Wardi Muslich*, ta'zir* juga merupakan jarimah . *Jarimah ta'zir* adalah jarimah yang sebagian terbesar jarimah nya dan seluruh sanksinya ditentukan penguasa. Namun, ada sebagian kecil *jarimah ta'zir* yang ditentukan syara' walaupun dalam hal hukuman diserahkan kepada kebijakan pemerintah. Nilai-nilai yang terdapat dalam aturan turun temurun di desa tabuyung adalah memiliki banyak manfaat baik dari segi keselamatan diri sendiri, keslamatan ibadah atau agama, dan serta memelihara alam supaya terjaga lingkungannya.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skiripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skiripsi yang berjudul **"(TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI MENANGKAP IKAN DI HARI JUM'AT STUDI DI DESA TABUYUNG KECAMATAN MUARA BATANG GADIS)"** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skiripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag, sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor

bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Bapak Dr. Ahmadnijar, M.Ag selaku wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Arbanur Rasyid, M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skiripsi ini.
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Kepada bapak kepala desa, tokoh adat dan masyarakat desa Tabuyung yang telah memberikan izin kepada saya untuk meneliti di desa Tabuyung.

9. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Marwin) dan Ibunda (Delima sari) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, membimbing dan yang selalu berdoa tiada hentinya serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmad dan kasih sayangnya kepada ayah dan ibu tercinta serta diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-nya.
10. Rekan-rekan Mahasiswa/i Hukum Pidana Islam angkatan 2019 yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
11. Kepada Motivator, teman, sahabat sekaligus saudara tercinta grup jelas tak jelas tetap gas : (Hendra Surya Hasibuan, S.H, Sahrijal Rambe S.H, Thamrin Husin S.H, Fuad Syarif, Jakaria Ansor, Rangga Harahap S.H, Iqbal Pinanyungan Munthe, Rajib Pangestu, Siti Suryani Siregar, S.H, Nelva Suryani S.H, Nita Novianti Harahap S.H, Ain Zahrona Harahap S.H, Nisvaria Damayanti Hasibuan)
12. Kepada HMI Komisariat Lafran Pane cabang Padangsidimpuan Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya, penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana Wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidimpuan, 17 Juni 2023
Penulis

Miko Amanda
NIM : 1910700002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	*ṡ*a	*ṡ*	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	*ż*al	*ż*	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
وُ	Dommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يْ.....	*Fatḥah* dan ya	Ai	a dan i
..... وْ	*Fatḥah* dan wau	Au	a dan u

c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا..َ..ى	*Fatḥah* dan alif atau	a	a dan

	ya		garis atas
...ِ.ى	*Kasrah* dan ya	i̲	I dan garis di bawah
....ُو	*Dommah* dan wau	u̲	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah*, dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada uatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah itu*.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:ال**.** Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu

dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il, isim,* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima,* Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBNG
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQSYAH
PENGESAHAN DEKAN
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN vi
DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokusan Masalah 4
C. Batasan istilah 5
D. Rumusan Masalah 6
E. Tujuan Penelitian 6
F. Kegunaan Penelitian 6
G. Penelitian Terdahulu 7

BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengertian Nelayan 12
1. Metode Metode Penangkapan Ikan 12
2. Macam–Macam Alat Tangkap Ikan 13
3. Pengertian Hukum Pidana Islam 14
4. Tujuan Hukum Pidana Islam 15
5. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam 17
6. Macam-Macam Jarimah 19
7. Pengertian Penangkapan Ikan 20
8. Pengertian Sanksi 22
9. Pengertian Tindak Pidana 25
10. Jenis-Jenis Tindak Pidana 26
11. Delik Formil Dan Delik Materiil 28

BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 29
B. Subjek Penelitian 29
C. Jenis Penelitian 29

D. Sumber Data 30
E. Teknik Pengumpulan Data 31
F. Tekhnik Pengecekan Keabsahan Data 31
G. Teknik Analisis Data 32
H. Sistematika Pembahasan 32

BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal 34
B. Aspek Demokrasi 35
C. Sanksi Menangkap Ikan di Hari Jum'at di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis 40
D. Tinjauan Hukum pidana Islam Terhadap Sanksi Menangkap Ikan di Hari Jum'at di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis 50
E. Menangkap Nilai-nilai Larangan Ikan di Hari Jum'at 55

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 57
B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah laut sangat penting bagi suatu negara, karena memiliki manfaat yang begitu besar tidak hanya bisa dijadikan sebagai wilayah perairan nasional namun bisa juga dimanfaatkan diberbagai sektor seperti objek wisata, sarana transportasi laut dan sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya dapat dikelola, dijadikan pendapatan dan penunjang oleh perekonomian negara.[1]

Penangkapan ikan secara ilegal adalah merupakan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku. Artinya penangkapan ikan yang melanggar itu merupakan penangkapa ikan yang dilarang atau memenuhi rumusan sesuai dengan undang-undang. Namun perlu dicermati definisi penangkapan ikan secara ilegal bisa diartikan penangkapan ikan diluar batas atau ketentuan yang ditentukan, atau juga bisa diartikan dengan penangkapan ikan yang tidak diregulasi dan yang tidak dilaporkan.[2]

Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan demi kelangsungan masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" Wilayah perairan yang luas selain memberikan

[1] Sulwafiani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perikanan*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar Hlm,2

[2] Endri, Jurnal ilmu hukum *penanggulangan kejahatan ilegal fishing di kepulauan riau*. Volume 5 No.2 februari 2015- juli 2015.

manfaat dan harapan yang besar tetapi juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan seperti tindak pidana Illegal Fishing yang banyak dilakukan oleh kapal berbendera negara asing yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah atau ilegal di laut teritorial Indonesia.[3] Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak kolektif boleh memanfaatkan hasil laut sebagai mata pencaharian terkhusus untuk masyarakat pesisir pantai dan proses pemanfaatannya bisa melalui penangkapan ikan.[4]

Dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Perikanan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, meyimpan, mendinginkan, menangani, mengelolah, dan atau mengawetkannya.[5]

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjelaskan bahwa Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.[6]

Secara umum Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis adalah daerah laut yang masyarakatnya sangat bergantung dengan laut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktanya bahwa Penduduk Tabuyung bergantung pada

---

[3] Elvinda Rima Harliza dan Tomy Michael, "*Penegakan Hukum Illegal Fishing*" dalam Jurnal Mimbar Keadilan, Volume 13 Nomor 1, Februari – Juli 2020, halaman 127

[4] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 28A.

[5] Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 245, Ps. 1 ayat (5) dalam Pasal 27 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

[6] Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

pekerjaan nelayan. Untuk melakukan kegiatan menangkap ikan, para nelayan menggunakan kapal atau perahu. Waktu penangkapan ikan di mulai pada pagi hari sampai sore menjelang magrib dan ada dari sore sampai pagi.

Di Desa Tabuyung terdapat laut dan sungai yang bersatu dan tidak dapat dipisahkan. Setiap melakukan penengkapan ikan, kapal motor harus melewati sungai yang bersatu dengan laut, dan bisa disebut dengan muara. Kapal menangkap ikan adalah kapal yang secara khusus yang digunakan untuk menangkap ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan. Alat tangkap yang digunakan yaitu jaring atau pancing.

Pada prinsipnya semua aktifitas pelayaran menangkap ikan tidak ada masalah atau larangan dalam islam, baik hari senin sampai ke hari minggu atau setiap hari, selagi menjalankan kewajiban seorang muslim. Namun di Desa Tabuyung tersebut ada aturan tersendiri secara turun temurun yakni bahwa tidak ada satupun nelayan di perbolehkan menangkap ikan di hari jum'at. Karna aturan tersebut memiliki manfaat baik untuk alam atau manusia, sebaliknya manfaat bagi alam yakni supaya biota laut atau organisme yang ada di dalam laut bisa berkembang biak pada hari itu.

Begitu sebaliknya manfaat bagi manusia supaya tidak merasa kesusahan dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim atau ibadah. Oleh karna itu kesempatan ini yang di larang. Didalam aturan itu memiliki batasan tersendiri yakni apabila melakukan pelayaran di hari jum'at baik dilaut maupun di sungai tanpa melakukan penangkapan ikan tidak ada masalah, mka di perbolehkan dengan tujuan hanya menguji mesin rusak atau tidak.

Masyarakat setempat mematuhi aturan yang selalu di pandang teguh dan ditaati bersama, yaitu adanya larangan menangkap ikan di hari jum'at, baik menggunakan kapal yang besar maupun kecil. Adapun sanksi terhadap aturan tersebut yaitu jika kapal besar maupun kecil yang melakukan pelanggaran terhadap aturan itu maka disanksi dengan memberikan semua ikan atau hasil yang dapat kapal pada hari itu, Sanksi yang dikenakan terhadap yang melanggar aturan itu akan di infak ke masjid.[7]

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih dalam mengenai masalah ini. Yang dituangkan dalam berntuk skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Pidana Isalam Terhadap Sanksi Pelayaran Menangkap Ikan Di Hari Jum'at Studi Di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis.

B. Fokusan Masalah

Mengingat adanya larangan pelayaran menangkap ikan di hari jum'at di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, maka fokusan masalah pada penelitian kali ini adalah sanksi berlayar di Hari Jum'at di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis.

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti membuat batasan masalah agar peneliti lebih terarah dan terfokus pada permasalahan ini membahas Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap sanksi Pelayaran Menangkap Ikan Dihari Jum'at.

[7] Hasil Wawancara Bersama Tokoh Adat Masyarakat Desa Tabuyung Bapak Mawardin Pada tanggal 20 Desember 2022, Pukul 19.00 wib.

C. Batasan istilah

Demi memudahkan pemahaman dalam judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman maka perlu di uraikan secara singakat yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah yang perlu di jelaskan adalah sabagai berikut :

1. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yamg masi menta kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian menggantikan data yang dihimpun untuk menjawab masalah.[8]
2. Hukum Pidana Islam adalah terminologi yang di pergunakan dalam islam untuk menyebut jinayah yaitu mencegah ketidak adilan, mencegah kedhaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan. Hukum pada dasarnya adalah apa yang difirmankan Allah ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan orang yang dibebani hukum dan dituntut pelaksanaanya.[9]
3. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya yang dapat dihukum.[10]
4. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas akutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan martim.[11]

---

[8] Surain, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia,*Bandung, 2005. Yrama Widya. hal. 26.
[9] Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqih*, Yayasan Al-ahkam, Makasar, 2002, hal.20
[10] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 35
[11] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran, Pasal 1, Ayat 1.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalah yang di angkat dalam penelitian berikut ini :

1. Bagaimana sanksi menangkap ikan di hari Jum'at di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis?
2. Bagaimana Tinjaun Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pelayaran Menangkap Ikan di Hari Jum'at Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis?
3. Apa nilai-nilai yang terdapat di larangan menangkap ikan di Hari Jum'at?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi menangkap ikan di Hari Jum'at di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis.
2. Untuk mengetauhi tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pelayaran menangkap ikan di Hari Jum'at Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis.
3. Untuk mengetahui nilai -nilai larangan menangkap ikan di Hari Jum'at.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

   Sebagai bahan reverensi dan informasi, sehingga karya tulis ilmiah ini di harapkan dapat dikembangkan oleh saya selanjutnya serta memberikan konstribusi oleh ilmu pengetauhan kususnya di bidang Hukum Pidana Islam.

2. Bagi Peneliti

   Untuk menambah wawasan dan dapat diperoleh pengetauhan dan pengalaman yang akan membuka cakrawala berpikir yang luas.

3. Bagi Pemerintah

   Penelitian ini di harapkan digunakan sebagai masukan dan refernsi bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan atau keputusan yang di pandang perlu untuk ketertiban masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang di uraikan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis telah menelusuri dengan beberapa tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian diantaranya adalah :

1. Indra Pradana Mulyawan, Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makassar, Dalam Skripsi Yang Berjudul Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Aturan Arung Ennengnge Dalam Proses Penangkapan Kan Di Danau Tempe Kabupaten Wajo ini menjelaskan bahwa Aturan adat di Danau Tempe telah dikodifikasikan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Kabupaten Wajo, namun dalam peraturan daerah ini lebih menspesifikkan tentang pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Wajo, sementara aturan adat hanya dicantumkan

dalam Bab VII Pasal 35 mengenai larangan-larangan, sementara sanksi adat (I Dosa) dan posisi Macua Tappareng tidak dicantumkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. Hal inilah yang menyebabkan kearifan lokal yang ada di Danau Tempe perlahan-lahan mengalami pemudaran dan menjadi faktor utama munculnya permasalahan-permasalahan lain yang mendera Danau Tempe dikarenakan aturan adat Danau Tempe tidak diatur secara spesifik dalam sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang kearifan lokal dan pembinaan adat istiadat.[12]

2. Desi Nailatul Fadillah, Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Negeri Bukitinggi, dalam skripsi yang berjudul sanksi tindak pidana illegel fhising di wilayah perairan sungai beremas kabupaten pasaman barat dalam presfektif fiqh jinayah. dalam Skripsi ini menjelaskan bahwa adapun mengenai sanksi tindak pidana illegal fishing atau pencurianikan diwilayah perairan Sungai Beremas adalah berupa pembayaran denda yang tidak sesuai dengan undang-undang perikanan dan membakar kapal berdasarkan kehendak masyarakat. Kapalnya dibakar tanpa melalui proses dan putusan pengadilan. Dalam perspektif fiqh jinayah sanksinya yaitu jatuh kepada hukuman ta'zir tidak dihukum had. Karena dan syarat dan rukun dari jarimah pencurian ikan tidak terpenuhi dan adanya unsur yang masih dianggap syubhat. Pemberian hukuman ta'zir diserahkan kepada penguasa (ulul amri) yang diberi kebebasan dalam memilih hukuman mana yang sesuai. Maka penjatuhan sanksi illegal fishing di

[12] Indra Pradana Mulyawan, Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makassar, Skripsi Yang Berjudul *Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Aturan Arung Ennengnge Dalam Proses Penangkapan Kan Di Danau Tempe Kabupaten Wajo*

Sungai Beremas tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan oleh ulil amri.[13]

3. Hendra Gunawan, jurnal el-qanuniy, UIN Syahada Padangsidimpuan dengan judul larangan melaut pada hari jum'at di Desa Singkuang ditinjau dari prespektif maqasid syari'ah, dalam jurnal ini menjelaskan bahwa larangan melaut pada hari jum'at di Desa Sinkuang Ditinjau Dari Frespektif Maqasid Syari'ah adalah tata cara penerapan sanksi terhadap nelayan melaut di hari jum'at di desa Singkuang terkait penerapan sanksi disini adalah proses penjatuhan hukuman terhadap nelayan, mulai dari pelaporan, peyidikan, sampai penjatuhan sanksi terhadap nelayan desa Singkuan yang melaut pada hari jum'at.[14]
4. Riswan Ciwang dan Ade Darmawan Basri, Jurnal Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ilegal Fishing Di Wilayah Hukum Polres Selayar Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Volume 3 Nomor 2 Agustus 2021, dalam jurnal ini menjelaskan bahwa menurut Kanit Gakkum Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, penegakan hukum dalam bidang perikanan terkait dengan kasus-kasus illegal fishing selalu menerapkan dan mengutamakan Undang-Undang Perikanan kemudian digabung dengan undang-undang lainnya. Jika tidak terbukti melakukan tindak pidana perikanan, maka aparat penegak hukum termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan serta

[13] Desi Nailatul Fadillah, Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Negeri Bukitinggi, dalam skripsi yang berjudul *Sanksi Tindak Pidana Illegel Fhising Di Wilayah Perairan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Dalam Presfektif Fiqh Jinayah*.

[14] Hendra Gunawan, Jurnal El-qunaniy*, Larangan Melaut Pada Hari Jum'at DI Desa Singkuang Ditinjau Dari Prespektif Maqasid Syariah*, Vol 8, nomor 2 edisi Juli-Desamber 2022

Balai Taman Nasional itu menggunakan beberapa Undang-Undang Lain yang dilanggarnya. Misalnya penggunaan Undang-Undang Darurat, Undang-Undang Pelayaran, dan sebagainya. Maka, sesuai dengan Undang-Undang tersebut Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pengawasan secara tegas.[15]

5. Putra Kurnia Pratama, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Skripsi Yang Berjudul, Tindak Pidana Pencurian Illegal Fhising Di Perairan Indonesia Menurut Hukum Prespektif Positif Dan Hukum Islam, dalam skripsi ini menjelaskan bahwa di dalam hukum Islam tentang Illegal Fishing tidak diatur secara jelas, namun di lihat dari bentuk kejahatannya, jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi dua, yaitu ketentuan hukuman yang sudah pasti kadar berat dan ringannya itu tergolong kedalam qisash dan diyat, dan ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim atau penguasa melalui putusanya yang disebut dengan hukuman ta‟zir. Illegal Fishing apabila penajtuhan hukumnya di dalam hukum Islam akan diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan ta'zir.[16]

Dari berbagai kajian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi pelayaran menangkap ikan secara illegal yang telah di tetapkan oleh negara atau daerah terpencil itu sangat dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku di

[15] Riswan Ciwang dan Ade Darmawan Basri, Jurnal *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ilegal Fishing Di Wilayah Hukum Polres Selayar Alauddin Law Development* Journal (ALDEV) Volume 3 Nomor 2 Agustus 2021

[16] Putra Kurnia Pratama, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Skripsi Yang Berjudul, *Tindak Pidana Pencurian Illegal Fhising Di Perairan Indonesia Menurut Hukum Prespektif Positif Dan Hukum Islam*

desa tersebut, bahwa sanksi menangkap ikan yang telah di tetapkan tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku yang menangkap ikan secara illegal. Berdasarkan kajian terdahulu diatas, peneliti ingin meneliti bagaimana sanksi pelayaran menangkap ikan dan apa nilai-nilai yang terdapat pada larangan pelayaran menangkap ikan di Hari Jum'at Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nelayan

Pengertian nelayan Menurut Imron sebagaimana dikutip oleh Mulyadi adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannyah tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau pun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Menurut Mulyadi nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan.

Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat milik orang lain. Sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.[17]

1. Metode Metode Penangkapan Ikan

Setiap jenis alat tangkap ikan memiliki karakter tersendiri seperti bahan yang digunakan, desain alat tangkap, peralatan bantu, kapal, dan cara alat tangkap dioperasikan. Pada dasarnya alat tangkap dirancang dan dioperasikan untuk menangkap jenis ikan tertentu atau kelompok ikan tertentu. Sifat dan

[17] https://www.psychologymania.com/2013/05/pengertian-nelayan.html 21.05

kebiasaan hidup ikan yang akan ditangkap sangat berpengaruh pada rancangan dan bentuk alat tangkap serta cara mengoperasikannya. Sesuai dengan cara (teknik) pengoperasiannya, alat tangkap ikan dapat dikelompokkan menjadi berikut ini:

a. Menghadang ikan.
b. Melingkari dan mengurung ikan.
c. Menarik dan menghela alat tangkap.
d. Mengangkat alat tangkap.
e. Memerangkap ikan.
f. Menggunakan umpan.
g. Memanah atau menombak.
h. Mengumpulkan ikan (rumpon, cahaya dan suara).

Ada jenis alat tangkap ketika dioperasikan hanya menggunakan salah satu cara yang disebutkan di atas, namun ada juga alat tangkap yang menggunakan lebih dari satu cara yang disebut di atas. Misalnya pukat cincin, di samping menggunakan cara melingkari dan mengurung kelompok ikan yang akan ditangkap, terlebih dahulu melakukan kegiatan mengumpulkan ikan sehingga hasil tangkapan ikan menjadi optimal.[18]

2. Macam–Macam Alat Tangkap Ikan

Alat tangkap dapat dikelompokkan menjadi dua menurut sifat penangkapannya, sebagai berikut:

a. Alat tangkap yang bersifat aktif.

[18] Von Brandt, A. (1984). Fish Catching Methods of the World. London: Fishing News Books.

b. Alat tangkap yang bersifat pasif.

Alat tangkap yang bersifat aktif adalah alat tangkap ikan (biasanya bersama dengan kapal) yang pada saat dioperasikan bergerak dengan aktif memburu, mengurung atau memprovokasi ikan. Contoh alat tangkap yang bersifat aktif adalah trawl, tonda, pukat cincin, payang, dan pukat pantai. Alat tangkap pasif adalah alat tangkap yang ketika dioperasikan tidak bergerak (diam saja).

Alat tangkap pasif menggunakan umpan sebagai atraktor untuk menarik ikan-ikan yang menjadi target tangkapan dan memanfaatkan sifat dan tingkah laku ikan. Contoh alat tangkap yang bersifat pasif adalah berbagai jenis rawai, bubu, set net, dan jaring insang. Alat tangkap aktif lebih agresif dan sifatnya mengejar atau mengurung ikan, namun di sisi lain biaya untuk mengoperasikan alat tangkap dan kapalnya umumnya lebih besar karena kapal bergerak sehingga konsumsi bahan bakar lebih banyak. [19]

3. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam tidak banyak difahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat, bahkan juga oleh masyarakat Islam itu sendiri. Masyarakat awam hanya menangkap dan memperoleh kesan bahwa sanksi Hukum Pidana Islam dilaksanakan kejam dan mengerikan. Mereka hanya menggambarkan tentang betapa kejamnya sanksi potong tangan terhadap pencuri, hukum rajam terhadap orang yang melakukan zina, serta hukum *jilid*

[19] Kristjonson, H. (1959). Modern Fishing Gear of the World I, II dan III. London: Fishing News Book.

(cambuk) dan *hudud* (hukum yang telah ditetapkan oleh Allah) pada umumnya.[20]

Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits.[21]

Hukum Pidana berisi ketentuan-ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan serta ancaman sanksinya apabila perbuatan itu dilanggar. jadi pada prinsipnya hukum pidana itu mengatur tentang tindak pidana dan pidana. Berdasarkan prinsip ini maka hukum pidana islam dapat didefenisikan sebagai hukum yang mengatur persoalan tindak pidana *jarimah* dan sanksi *uqubah*.

Jika pengelompokan hukum–hukum islam sebaga imana dikemukakan bahwa hukum pidana itu termasuk bagian dari hukum islam yang dipeljari dalam ilmu fiqih (fiqih jinayah). Jadi dengan demikian bisa dikatan disini bahwa hukum pidana islam itu adalah hukum islam yang berkaitan dengan masalah pidana, atau dengan kata lain hukum pidana islam adalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dan sanksi menurut hukum syriat islam.[22]

4. Tujuan Hukum Pidana Islam

Syariah islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal mendasar dalam kehidupan umat manusia. lima hal itu adalah aspek agama,

---

[20] Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara persada Utama,2018) hal. 1

[21] Ibid. hlm. 3.

[22] H. Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum pidana islam*, Fakultas Hukum Pidana Islam Muhammadiyah, Jl. Lingkar barat, Yogyakarta, 2020. hlm. 19.

aspek akal, aspek jiwa, aspek harta benda, dan keturunan. Lima hal ini merupakan hal yang sangat fundamental dalam pangangan islam bagi umat manusia. kelima hal ini dikenal sebagai lima perkara pokok. Kepentingan lima hal ini yang dilindungi oleh syariat islam. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah dengan menggunakan sarana hukum pidana islam. Adapun tujuan tujuan hukum pidana islam yaitu :

a. Memelihara agama (hifdzu al-din) Agama adalah sesuatu yang penting bagi manusia, maka menjaganya merupakan salah satu concren dari syariat islam. Pemeliaran atas agama dilakukan dengan cara memerintakan kaum muslimin untuk mentahuidkan Allah dan menyambahnya. Untuk itu ditetapkanlah ibadah – ibadah seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan lainya.
b. Memelihara jiwa (hifdzu al-nafs) dalam rangka memberikan pemeliharaan atau perlindungan atas jiwa, islam menyuru kaum muslim untuk menkonsumsi makanan dan minuman yang halal, menjaga kesehatan badan dan berobat apabila sakit. Islam dalam waktu yang sama melarang mencedrai anggaota badan sendiri maupun orang lain, dan lebih-lebih tinggi islam mengharamkan bunuh diri dan membunuh orang lain tanpa hak, agar jiwa raga manusia terpelihara dari segala perkara yang membahayakannya.
c. Memelihara akal (hifdzu al-aql) Akal jugak termasuk perkara yanga sangat penting bagi manusia dengan akal mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan itu dihasilkan segala kemudahan hidup. Dengan akal pula manusian sempurna sebagai manusia, karena sesunggunya pada akal lah terletak perbedaan antara manusia dengan

binatang terletak. Manusia juga dihargai secara utuh dalam lapangan kehidupan sosial, politik dan ekonomi karena keberadaan akal tadi.

d. Memelihara keturunan (hifdzu al-nasl)) Islam bahwa memndang keturunan itu sesuatu yang penting dan harus di jaga. Untuk memelihara keturan , islam mewajibkan kaum muslimin untuk menjaga kehormatan diri dan menikah secarah sah. Islam juga memerintahkan kaum muslimin untuk menghidari pornografi, pornoaksi, perbuatan zina, dan segala macam bentuk maksiat yang menyebabkan rysaknya harga diri seseorang manusia dan keturunannya.
e. Memelihara harta benda (hifdzu al-maal)Harata benda merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia, karna harta benda bisa manusia memenuhi sebagian besar hajatnya. Harta benda dilindungi oleh jaran islam. Untuk memelihara harta islam menyuruh kaum muslim untuk mencari harta ysng halal, baik bekerjarja dibidang- bidang pekerjaan yang dibenarkan oleh syariat dan dengan cara islami serta membelanjakan harta terhadap hal-hal yang baik.[23]

5. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam adalah suatu perbuaatan apabila memenuhui unsur-unsur yang melekat pada istilah jarimah itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam unsur–unsur jarimah itu terbagi menjadi dua yaitu unsur umum dan unsur khusus adapun unsur umum dan unsur khusus sebagai berikut :

[23] H. Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum pidana islam*, Fakultas Hukum Pidana Islam Muhammadiyah, Jl. Lingkar barat, Yogyakarta, 2026 hlm 23.

a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman dan hukuman atas perbuatan-perbuatanya. Unsur ini dikenal dengan istilah dengan unsur formal.
b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur materil.[24]

Pada dasarnya ada dua unsur tindak pidana pokok atau jarimah, yaitu unsur yang melekat pada perbuatannya dan unsur yang melekat pada orangnya atau pelakunya. Dalam literatur yang membahas tentang jarimah dikenal adanya tiga unsur jarimah.

Unsur formal (syar'i) yang dimaksud dengan unsur syar'i atau unsur formal adalah adanya nasb (ayat al-qur'an atau hadits nabi) yang menyatakan bahwa sesuatu perbuatan itu adalah salah dan dapat dihukum atau diancam dengan hukuman. Nash ayat atau hadits tersebut sudah harus ada sebelum perbuatan itu dilakukan, dan bukan sebaliknya. Hal ini karena sebelum datangnya ayat atau hadits, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai jarimah. Unsur formal ini disebut dalam hukum positif sebagai asas legalitas. Unsur formal ini diterapkan oleh sayriat dengan sangat rinci atas jarimah-jarimah hudut dan jarimah-jarimah qias wa diyat.

Unsur materil atau *maddi* dalam hukum positif disebut unsur objektif, yaitu prilaku yang bersifat melawan hukum, maksudnya ada perbuatan yang membentuk jarimah, baik secara aktif maupun pasif yaitu dengan cara

[24] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upayah Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 20015, hlm 3.

melakukan atau membiarkan. Misalnya dalam pencurian adanya perbuatan mengambil milik orang lain. Dan dalam pembunuhan pasif misalnya, seperti membiarkan seorang bayi mati kelaparan atau kedinginan. [25]

Unsur moril yang di maksud dengan unsur moril ini adalah adanya tanganggug jawab pidana dari pelaku jarimah. Dengan kata lain sipelaku jarimah itu haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam syariat islam orang yang dapat mempertanggung jawabkan pebuatannya disebut mukallaf yaitu orang yang dibebani dengan beban agama. Mukallaf tersebut haruslah orang yang berakal dapat memahami hukuman, mengarti apa yang dibebani kepananya oleh agama dan mampun menerima beben sertah telah mencapai usia baligh.[26]

6. Macam-Macam Jarimah

Adapun macam-macam jarimah dilihat dari pelaksanaannya yakni Jarimah atau tindak pidana itu dapat dikategorikan menjadi bermacam-macam bentuk dan jenis tergantung beberapa sudut pandang yang berbeda. Jika dilihat dari peleksanaannya, maka jarimah dapat dibagi menjadi jarimah ijabiyah dan jarimah salabiyah.

Jarimah *ijabiyah* adalah jarimah yang dilanggar oleh seseorang dengan ialah melakukannya. Jadi dalam jarimah ini sipelaku melakukan jarimah itu secara ijabi atau aktif. Seperti berzinah, minuman arak dan lain sebagainnya.

Jarimah *salabiyah* adalah jarimah yang dilanggar oleh seseorang dengan jalan membiarkannya atau melakukannya. Dalam jarimah ini sipelaku

[25] H. Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum pidana islam*, Fakultas Hukum Pidana Islam Muhammadiyah, Jl. Lingkar barat, Yogyakarta, 2026 hlm 75.

[26] Ibid hlm 80

melakukan suatu yang wajib ia lakukan. Ia salabi atau pasif tidak melakukannya dengan di perintahkan. Contohnya ia tidak melakukan shalat, tidak membayar zakat, tidak menolong orang yang kecelakaan padahal ia mampu penolongnya dan seterusnya.[27]

Maka jarimah bisa diklasifikasikan menjadi jarimah maqsbudah dan jarimah gair maqsbudah. Jika dilihat dari objeknya, maka jarimah dapat dikelaskan menjadi jarimah adbid al-jarimah. Jika dilihat dari motofnya, maka jarimah dapat dibagi menjadi jarimah siyasiyah dan jarimah adiyah. Maka jarimah dapat dibagi menjadi jarimah syasyah dan jarimah adiyah. Dan jika dilihat dari bobot hukumannya, maka jarimah bisa dikategorikan menjadi tiga yaitu jarimah hudud, jarimah qisas wa diyat dan jarimah tak'zir.[28]

7. Pengertian Penangkapan Ikan

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mengelolah dan mengawetkan.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan nya mulai dari produksi, produksi, pengelolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanankan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Ikan adalah segala jenis

[27] Ibid hlm 90
[28] Ibid hlm, 89

organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.

Kapal perikanan adalah kapal, perahu ,atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan atau pembudidayakan ikan, pengangkutan ikan ,pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian atau eksplorasi perikanan.[29]

Oleh karena salah satu pengertian kegiatan penangkapan ikan secara ilegal ini adalah tindakan menangkap ikan yang dilaksanakan dengan tidak sah oleh kapal nasional dan juga kapal asing pada perairan yang ada di bawah yuridiksi suatu negara tanpa perizinan dari negara yang bersangkutan sehingga bertentangan dengan aturan perundangan yang diberlakukan di negara itu.[30]

Daerah penangkapan ikan merupakan suatu daerah perairan dimana ikan yang menjadi sasaran penangkapan tertangkap dalam jumlah yang maksimal dan alat tangkap dapat dioperasikan serta ekonomis. Suatu wilayah perairan laut dapat dikatakan sebagai "daerah penangkapan ikan" apabila terjadi interaksi antara sumber daya ikan yang menjadi target penangkapan dengan teknologi penangkapan ikan yang digunakan untuk menangkap ikan.

Pemanfaatan perkembangan teknologi angkasa luar (satelit) memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan sumber daya perairan. Salah satunya adalah untuk memetakan daerah penangkapan ikan demersal dengan bantuan GPS (Global Positioning System) dengan menggunakan pendekatan parameter oseanografi yaitu salinitas, kedalaman, suhu, arus dan kecerahan.

---

[29] Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

[30] Keiko Hauriza Setiawan dan Dyah Setyorini, Jurnal Analisis Yuridis Penangkapan Ikan Tanpa Siup Dan Sipi Oleh Kapal Berbendera Asing, Vol. 4 No. 5 2022 : Hal : 1189-1198

Operasi penagkapan Operasi penangkapan dilakukan pada perairan yang memiliki kedalaman 25-60 meter. Bila menggunakan rawai dasar, keadaan dasar perairan harus diperhatikan karena batu atau karang bias saja menjerat tali pancing dan membuatnya putus. Apabila dasarnya berlumpur, maka rawai tidak perlu diletakkan secara tetap di bagian dasar tetapi dibiarkan menggantung beberapa sentimeter dari dasar.[31]

8. Pengertian Sanksi

Hukum pada dasarnya memiliki sifat mengatur dan memaksa, didalam sifat hukum yang mengatur terdapat larangan-larangan, dan apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan. Diaturnya sanksi dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dimaksudkan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan (diatur) dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi, manakala terjadi pelanggaran.[32]

Menurut Black's Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang.33 Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan.

---

[31] Skripsi, St Nurhalizah.Hs,Analisis Daerah Penangkapan Ikan Pada Pengoperasian Rawai Dasar Di Perairan Bulukumba Sulawesi Selatan, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya

[32] Sri Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: suatu pendekatan komparasi, Jurnal Adminitrasi Pemerintahan Vol 2 Issue 1 (2019), hlm. 126

[33] Samsul Ramli dan Fahrurrazi, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014, hlm. 191

Tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya.

Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi. Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi.

Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan "legal" apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya Pengertian sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu "alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.

Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum Administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidak patuhan (*reactive op nietnaleving*).[34]

[34] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakatra: PT. Raja Grafindo, 2006, hlm. 315.

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undangundang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme

dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifiksi non penderitaaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata. Dalam Pasal 44 ayat 2 KUHP perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.[35]

9. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[36]

---

[35] Siska Amelya dan Fitri Elfiani, jurnal Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Of Juridische Analyse. hlm 44.

[36] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008 hlm 59.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.[37]

10. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

a. Menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II Dan pelanggaran yang di muat dalam buku III. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah tindak pidana itu diancam dengan pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan perbuatan yang oleh masyarakat baru sadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskan sebagai delik.
b. Tindak pidana formal dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu

[37] Lamintang,, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984 hlm. 183.

siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.[38]

Berdasarkan bentuk kesalahan di bedakan antara tindak pidana sengaja atau dolus dan tindak pidana tidak sengaja culpa. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya yang dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa. Sebaliknya macam perbuatannya dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana fasif atau negatif disebut juga tindak omosi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang yang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam pidana yang dirumuskan secara formil maupun materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatanya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya

[38] Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983, hlm. 136

berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif., atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang , tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar benar timbul.39

11. Delik Formil Dan Delik Materiil

a. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Jadi segala perbuatan yang jika melanggar hukum itu disebut dengan delik formil dari tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang merugikan tersebut. Misalnya penghasutan yang terdapat di Pasal 160 KUHP, kemudian Penyuapan di Pasal 209 dan 210 KUHP,dan sumpah palsu pasal 242 KUHP. Jadi segala perbuatan yang dirasa melanggar hukum dapat disebut dengan delik formil.

   Sementara delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang terjadi setelah adanya perbuatan melanggar hukum. Jadi Ketika suatu perbuatan yang melanggar hukum itu tidak menimbulkan kerisauan berkelanjutan maka bukan tinjauan utama dari delik materiil ini. Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah menghasilkan akibat yang tidak dikehendaki atau tidak sesuai. Misalnya dalam pembakaran pasal 187 KUHP kejadian pembakaran merupakan suatu hal yang merugikan orang dan akibatnya sangat nyata dirasakan dan dapat dilihat.[40]

---

[39] Dr.Fitri Wahyuni, S.H,.M.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia,* PT. Nusantara Persada Utama, 2017 hlm 55.

[40] Isnaini Galih Utami dan Isnaini Galih Utami, *Makalah Jenis jenis Tindak Pidana,* Program Studi Ilmu Hukum, tahun 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan desember 2022 sampai waktu yang belum ditentukan. Penelitian ini dilaksanakan di desa Tabuyung Kecematan Muara Batang Gadis, alasan Peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui dan melihat bagaimana dan apa saja penyebab terjadinya permasalahan tindak pidana pelayaran menangkap ikan di hari jum'at desa Tabuyung muara batang gadis.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu ada beberapa orang yg melakukan pelayaran menangkap ikan di hari jum'at, untuk mendapatkan lebih banyak data di peroleh dari masyarakat yang mengalami permasalahan pelanggaran pelayaran menangkap ikan di hari jum'at, dengan menggunakan metode *purposive sampling. Purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan atau berkaitan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah sosial, dan lain- lain.[41]

Tujuan peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha mengetahui dan memahami dengan cara wawancara kepada masyarakat yang ada ataupun penduduk asli di Desa Tabuyung Kecematan Muara Batang Gadis. Jadi metode yang digunakan oleh peneliti adalah Prespektif Analitis yaitu penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu.[42] Penelitian ini mencoba mendeskripsikan penyebab terjadinya pelanggaran pelayaran di hari jum'at di desa Tabuyung kecematan muara batang gadis.

D. Sumber Data

Adapun Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

   erupakan data yang diperoleh dari pandangan atau perspektif melakukan pelayaran di hari jum'at permasalahan yang dihadapinya dengan anggota kapal yang melakukan pelayaran.

2. Data Sekunder

   Merupakan data yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan Ketentuan membina ketertiban untuk melakukan pelayaran, literatur-literatur maupun jurnal ilmiah.

---

[41] Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium*, Vol 5, No. 9, Januari-Juni 2009, hlm. 2.

[42] Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,1990), hlm. 87.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

   Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap beberapa masyarakat yang berpenduduk asli di desa Tabuyung kecematan muara batang gadis yang mengalami permasalahan pelanggaran pelayaran menankap ikan di hari jum'at.

2. Observasi

   Dalam metode ini, peneliti nantinya akan mengumpulkan data dan mencatat informasi mengenai apa yang peneliti maksud, sehingga diperoleh secara langsung oleh peneliti berdasarkan hasil pengamatan.

F. Tekhnik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Waktu

   Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

2. Triangulasi Sumber

   Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan

apa yang dikatakan secara peribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif induktif. Metode kualitatif sebagai perosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan masyarakat yang mengalami permasalahan pelanggaran menangkap ikan di hari jum'at desa Tabuyung kecematan muara batang gadis. Kemudian pada aplikasinya data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisa dengan cara berfikir induktif yaitumenganalisa data yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I merupakan bab pendahuluan tentang fenomena yang akan diangkat dalam penelitian ini, dalam bab ini berisi latar belakang pemilihan judul, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.
2. BAB II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi deskripsi konseptual dan sub fokus penelitian dan hasil penelitin yang relevan yang pernah diteliti sebelumnya.
3. BAB III merupakan bab yang berisi metode penelitian mengenai waktu dan

lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

4. BAB IV merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, tinjauan hukum pidana islam terhadap pelanggaran pelayaran menangkap ikan di hari jum;at desa tabuyung kecematan muara batang gadis.
5. BAB V merupakan bab terakhir ataupun penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab I, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitia ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal

1. Sejarah Desa Tabuyung

Desa Tabuyung adalah pemukiman masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Desa Tabuyung berasal dari bahasa pesisir dan menurut lejenda Desa Tabuyung berasal dari kampung Jambu yang berada di Kecamatan Muara Batang Gadis yang jaraknya kurang dari 2 km kearah timur desa Tabuyung yang sekarang ini uda termasuk desa tabuyung. [43]

Seiringnya dengan berjalannya waktu sekitar tahun 1989 dari salah satu masyarakat kampung Jambu memperluas wilayah kearah barat dengan menanam tebuh di pinggiran sungai yang berdekatan dengan pantai dan disinilah masyarakat kampung jambu membentuk perkampungan Desa Tabuyung tersebut dan berjalan waktu masyarakat kampung jambu atau dijuluki dengan medan baik memperbanyak berkebun tebuh dan sebagaian sebagai nelayan pemburuh ikan setelah itu beriringnya waktu pada tahun 1990 kampung jambu berubah menjadi atau ditetapkan menjadi Desa Tabuyung, dari nama desa tersebut terdapat makna dilamnya yang di ambil dari kata tebuh dan buyung yang bermakna laki-laki yang kuat.[44]

[43] Hasil Wawancara Dengan Ibuk Rasnawati Selaku Msayarakat Desa Tabuyung Pada Tanggal 02 Agustus 2023

[44] Hasil Wawancara Bersama Tokoh Adat Masyarakat Desa Tabuyung Bapak Mawardin Pada tanggal 31 juli 2023.

2. Demografi Desa Tabuyung

Desa Tabuyung merupakan suatu pemukiman masyarakat yang terletak di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 7.700 H dan merupakan salah satu dari wilayah Kecamatan Muarah Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal yang terdiri dari 23 kecamatan, 27 kelurahan dan 37 Desa dengan luas wilayah 6.134,00 km.

Adapun batas-batas wilayah Desa Tabuyung sebagai berikut :

a. Sebelah utara berbatas dengan Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis.
b. Sebela selatan berbatas dengan Desa Talukbale Kecamatan Muara Batang Gadis.

Seperti daerah lain indonesia sendiri, Desa Tabuyung mempunyai iklim kemarau dan penghujan disertai badai, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap nelayan yang ada di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis.[45]

B. Aspek Demokrasi

1. Keadaan Penduduk

Desa Tabuyung termasuk desa yang penduduknya banyak dalam untuk ukuranya, namun demikian secara administrasi pemerintahan Desa tidak ada pembagian dusun dengan jumlah penduduk 5.391 jiwa atau 1.640 kk dengan perinci sebagai berikut :

[45] Hasil Wawancara Dengan Bapak zul kipli sebagai Tokoh masyarakat Desa Tabuyung, pada tanggal 01 agustus 2023.

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	2.793
2.	Perempuan	2.598
3.	Kepala Keluarga	1.640

Sumber kantor Desa Tabuyung 31 juli 2023.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 5.391 jumlah warga yang berjanis kelamin laki-laki 2.793 sedangkan perempuan 2.598 dan bila dirinci berdasarkan umur dengan tabel sbagai berikut.[46]

Umur Tahun	Jumlah (jiwa)
0 bln – 12 bulan	791
1 thn – 4 thn	835
5 thn – 14 thn	991
15 thn – 39 thn	1089
40 thn – 64 thn	889
64 tahun keatas	796
Jumlah	5.391

Sumber Kantor Desa Tabuyung 31 Juli 2023

2. Jumlah penduduk menurut golongan agama

Penduduk desa tabuyung jika ditinjau dari segi agama atau kepercayaan mayoritas seluruh penduduk Desa Tabuyung Beragama Islam dengan rincian sebagi berikut :[47]

a. Islam 5.391

[46] Hasil wawancara Dengan Bapak Iswanil Syah Selaku Kaur Perencanaan Desa Tabuyung pada tanggal 01 Agustus 2023.

[47] Hasil Wawancara Dengan Bapak Arif Selaku Kasi Pelayanan Desa Tabuyung Pada Tanggal 01 Agustus 2023

b. Kristen 0

c. Khatolik 0

d. Hindu 0

e. Budah 0

3. Aspek pendidikan

Pada dasarnya salah satu faktor yang paling mempengaruhi masyarakat Desa Tabuyung utamanya terhadap pemuda/i adalah dalam bidang pendidikan terutama dalam pendidikan agama, apabila lingkunganya banyak mengajarkan nilai–nilai agama maka dengan sendirinya masyarakat akan menjalankan kehudipan bermasyarakat dengan unsur-unsur agama dalam kepribadiannya .[48]

Pengaruh keagamaan itu juga tidak terlepas dari pendidikan orang tua, guru sekolah dan lain sebagianya, apabila pendidikan dibanding agama maka dengan sendirinya kesadaran untuk tidak berbuat perbuatan yang tercela akan muncul dari hatinya.

Pendidikan di Desa Tabuyung sama halnya dengan desa yang lain dan yang secara umum memadai masyarakat keperguan tinggi dibuktikan dengan adanya beberapa pemuda/i yang sudah termasuk dalam perguruan tinggi baik itu perguruan tinggi negeri maupun suwasta.[49]

Untuk data penduduk menurut pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

[48] Hasil wawancara dengan bapak ifin selaku masyarakat Desa tabuyung pada tanggal 4 agustus 2023

[49] Hasil Wawancara dengan Bapak Pudan selaku masyarakat Desa Tabuyung pada tanggal 6 Agustus 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak sekolah / Buta Hurup	22
2.	TK / PAUD	135
3.	SD / Sederajad	650
4.	SLTP / Sederajad	750
5.	SLTA / Sederajad	876
6.	Perguruan Tinggi	581

Sumber kantor Desa Tabuyung pada tanggal 31Juli 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat Desa Tabuyung sebagian mereka tetap mendapatkan pendidikan meski hanya pendidkan dasa scara umum. sehingga hal tersebut yang menjadikan mereka kurang dalam pengetahuan mengenai dampak Pelayaran menangkap ikan di hari jum'at tersebut.

4. Aspek Ekonomi

Dalam bidang perekonomian masyarakat Desa Tabuyung bisa dikatakan cukup sejahtera dengan pertumbuhan dan pertambahan penduduknya, masyarakat desa Tabuyung mencari penghasilan dengan mayoritas sebagai nelayan, yaitu sebagai pemburuh ikan di laut lepas, sawit dan ada juga sebagian yang menjadi buruh tani, Pns, dan pegawai swasta, disamping ada juga sebagian kecil yang membuka usaha kecil-kecilan seperti

mebuka toko dan lain sebagainya.[50]Untuk data masyarakat Desa Tabuyung jika diperhatikan dari pekerjaan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

NO	Jenis pekerjaan	Jumlah
1,	Petani	564
2.	Pedagang	321
3.	Nelayan	802
4.	PNS	267
5.	Swasta	1
6.	Lain – lainya	18

Sumber kantor Desa tabuyung pada tanggal 31 juli 2023

5. Aspek Pemerintahan

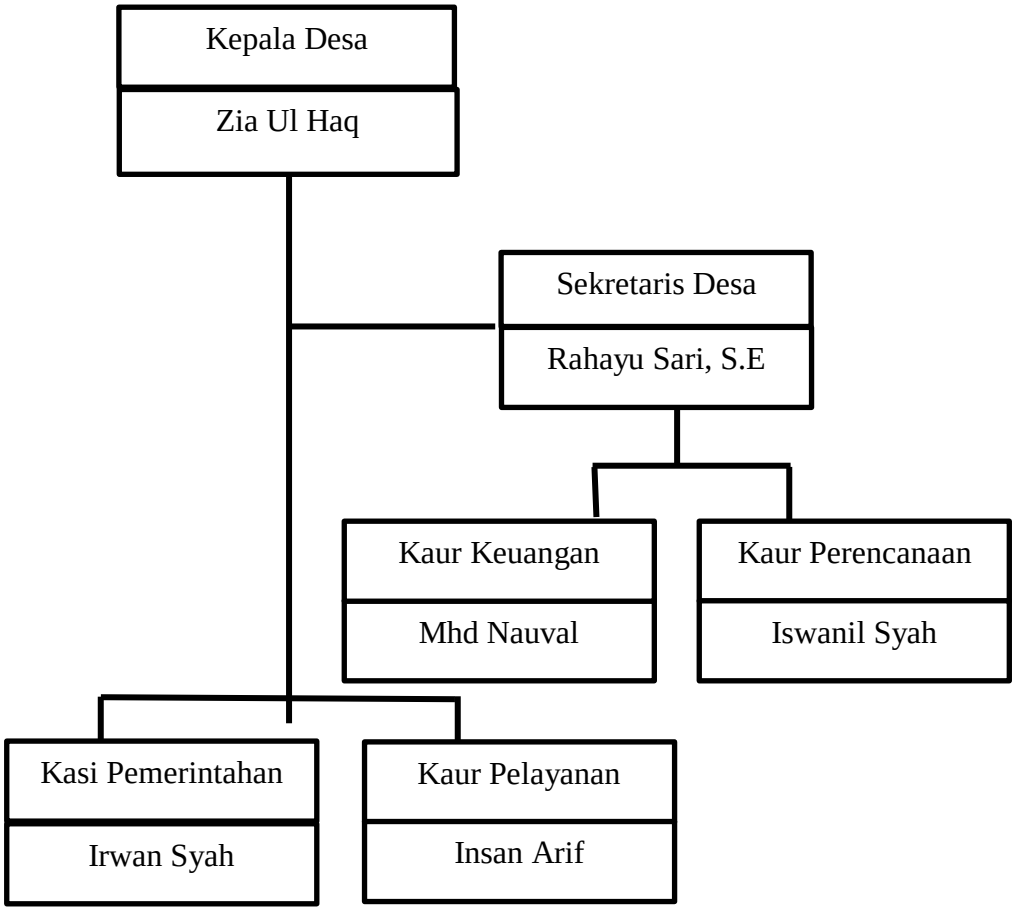
Dalam pemerintahan di Desa Tabuyung sama halnya dengan pemerintahan lain atau sebuah organisasi yang dibawah naungan pemerintahan ataupun swasta, besar ataupun kecilnya suatu lembaga tersebut tidak lepas dari adanya kepengurusan sebaimana di paparkan dalam UU No 06 tahun 2014 bahwa dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peran dalam kemajuan desa tersebut yaitu pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan.[51]

Di Desa Tabuyung yang memiliki dan menjalankan wewenang pimpinan adalah kepala desa (kades) dibantu dengan badan permusyawaratan

[50] Hasi wawancara dengan Bapak Nabawi Selaku BPD desa tabuyung pada tanggal 10 Agustus 2023.

[51] Hasil wawancara Dengan Bapak Iswanil Syah selaku kaur perencanaan Desa Tabuyung pada tanggal 10 Agustus 2023

desa (BPD), sekertaris desa (sekdes) dan beberapa kepala urusan (kaur) untuk jelasnya terkait struktur pemerintahan di Desa Tabuyung dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :



C. Sanksi Menangkap Ikan di Hari Jum'at di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis.

1. Kedudukan Peraturan Secara Turun Temuurun Yang Relatif Kuat

   Pada dasarnya peraturan secara turun temurun merupakan kebiasaan yang etensinya atau keberadaanya telah di akui oleh masyarakat Desa Tabuyung dalam kehidupan sehari-hari. Selain tuntunan agama maka cendrung ke adat istiadat atau aturan turun temurun yang sudah di pandang

teguh oleh masyarakat. agama menjadi tuntunan kehidupan sehari-hari masyarakat.[52]

Peraturan secara turun temurun sudah menjadi aturan terus –menerus yang dipertahankan eksistensinya oleh masyarakat terdahulu, aturan-aturan yang tertera dalam aturan tersebut di ambil dari pengalaman yang mereka alami.[53]Masyarakat Desa Tabuyung mayoritas beragama Islam, sehingga ajaran agama Islam masih melekat dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi dalam hal yang berhubungan masalah pelayaran menangkap ikan, pada dasarnya masyarakat Desa Tabuyung lebih mengutamakan menyelesaikan perkara dengan melibatkan hukum adat yang telah ditentukan secara turun-temurun.[54]

Masyarakat Desa Tabuyung yang melakukan pelayaran penangkapan ikan pada hari Jum'at akan dikenakan hukuman adat yang telah ditentukan tanpa harus membawa masalah tersebut ke pihak kepolisian tapi dislesaikan dengan keptusan adat istiadat atau atuan scara turun temurun. Adapun yang menjadi alasan masyarakat Desa Tabuyung lebih memilih aturan secara turun temurun sebagaimana yang di ungkapkan beberapa masyarakat yaitu, karena peraturan tersebut lebih mengutamakan sifat kekeluargaan dan dengan hukum ini juga lebih memudahkan dalam segala urusan tentang

[52] Hasil Wawancara dengan Bapak Andi selaku masyarakat Desa Tabuyung Pada tanggal 06 Agustus 2023.

[53] Hasil wawancara dengan Bapak Edon selaku masyrakat Desa Tabuyung pada tanggal 06 Agustus 2023.

[54] Hasil wawancara deangan Bapak Rahmat selaku masyarakat Desa Tabuyung pada tanggal 08 Agustus 2023

pelayaran menangkap ikan penyelesain dibandingkan dengan hukum yang lain.[55]

Sama halnya dengan pendapat yang diungkapakan oleh bapak Rahmat selaku masyarakat Desa Tabuyung. Masyarakat memberlakukan aturan secara turun-temurun bukan karena tidak setuju dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini, akan tetapi peraturan ini sudah menjadi hukum yang berlaku dari nenek moyang terdahulu sebelum adanya hukum yang berlaku di Indonesia seperti sekarang.[56]

Senada dengan penjelasan yang diberikan bapak Rahmat, bapak Redo orang yang pernah berbuat kesalahan pelaran menangkap ikan di hari jum'at akan diselesaikan dengan hukum secara turun temurun, dan juga memberikan penjelasan bahwa beliau sangat setuju hukum secara turun-temurun ini lebih diutamakan dalam bidang pelayaran menangkap ikan di desa Tabuyung dari pada hukum yang beralaku di negara ini dengan alasan bahwa dengan hukum ini semua orang yang melakukan kejahatan seperti melakukan pelayaran menangkap ikan di hari jum'at, terjamin di hukum dengan adil.[57]

Dari beberapa pendapat atau alasan yang sudah dipaparkan di atas penulis menyimpulkan bahwa masyarakat desa Tabuyung lebih memilih hukum adat setempat dalam menyelesakan masalah Pelayaran

[55] Hasil wawancara deangan Bapak Rizal selaku masyarakat Desa Tabuyung pada tanggal 07 Agustus 2013

[56] Hasil Wawancara Dengan Bapak Riko selaku masyarakat Desa Tabuyung Pada Tanggal 14 agustus 2023

[57] Hasil Wawancara Dengan Bapak Redo Selaku Masyarakat Desa Tabuyung Pada Tanggal 13 Agustus 2023

menangkapikan di hari jum'at disebabkan karenan hal ini juga dimungkinkan karna tingginya saling menghargai atau persaudaraan di tengah-tengah masyarakat sehingga masalah diselessaikan dengn hukum adat masyarakat.

2. Faktor Penyebab Masyarakat Menangkap Ikan Di Hari Jum'at.

Pelayaran merupakan suatu kegiatan memburuh ikan dengan mengunakan kapal, seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu, namun dalam setiap perbuatan atau tindakan tidak terlepas dari sebab akibat, yang mana dalam perbuatan tersebut tidak terlepas dari sebab terjadinya.

Faktor terjadinya perlayaran menangkap ikan di hari jum'at di Desa Tabuyung sebagai berikut :[58]

a. Faktor Kurang Pengawasan Pemerintahan Desa.

Linkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda suberdaya, energy, keadaan, dan mekluk hidup termaksud juga prilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri serta kelangsungan perkehidupan. Lingkungan dalam masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam hal apapun terhadap tingkah laku setiap orang, baik itu bagi anak-anak, remaja, dan orang tua, seperti pelayaran dan lain sebaliknya yang mana dengan pengaruh lingkungan orang-orang banyak melakukan perbuatan yang tidak baik tanpa memikirkan aturan adat yang telah diterapkan.

[58] Hasil Wawancara Dengan Bapak Sandi Selaku Masyarakat Desa Tabuyung Pada Tanggal 14 Agustus 2023

Selain itu salah satu pemuda masyarakat desa Tabuyung yaitu Jubeir menjelaskan bahwa dari pendidikan dalam ilmu agama, masyarakat juga kurang dalam pengawasan menganai pelayaran menangkap ikan di desa tabuyung, sehingga hal tersebut cendrung menjadikan pekerjaan terus - menerus.[59]

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintahan desa kurang dalam pengawasan terhadap masyarakat yang masih melakukan pelayaran untuk menangkap ikan di hari Jum'at sehingga menjadi Faktor penyebab terjadinya pelayaran menangkap ikan di hari jum'at tersebut.

b. Faktor Ekonomi

Ekonomi adalah suatu kebutuhan hidup yang harus di penuhi dalam kehidupan sehari-hari baik dari segi materil maupun formil seperti makanan ataupun minuman dan lain-lain. Pada dasarnya masyarakat desa tabuyung sangat bergantung pada pekerjaan nelayan dan laut dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan pekerjaan nelayan dengan memburuh ikan kelaut mengunakan kapal, begitu sebaliknya tanpa melakukan pelayaran menangkap ikan masyarakat desa tabuyung akan merasah susah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.[60]

Disini peneliti juga memaparkan sebab terjadinya menangkap ikan di hari jum'at sebagaimana yang diungkapakan oleh salah satu orang yang

[59] Hasil wawancara Deangan Bapak Jubir Selaku Masyarakat Desa Tabuyung Pada Tanggal 19 Agustus 2023

[60] Hasil Wawancara Dengan Bapak Ilham Selaku Masyarakat Desa Tabuyung Pada Tanggal 12 Agustus 2023

bersangkutan pada kasus ini atau lebih tepatnya si pelaku dia mengungkapakan bahwa penyebab terbesar terjadinya pelayaran menangkap ikan di hari jum'at ini adalah karena pada saat itu keadaan sudah mendesak perekonomian rumah tangganya sehingga untuk memperbaiki perekonomian rumah tangga terpaksa melakukan menangkap ikan dihari jum'at, sehingga dengan hal tersebut dia terjarumus melakukan menangkap ikan di hari jum'at di Desa Tabuyung.

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa kurangnya perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebuthan sehari-hari sehingga tepaksa masyarakat harus mencari ikan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebab kurangnya perekonomian menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pelayaran menangkap ikan di hari jum'at di Desa Tabuyung kematan muara batang gadis.

3. Faktor Pendidikan

Selain faktor pengawasan, Faktor pendidikan juga sangat berpengaruh besar dalam masyarakat, terkhususnya bagi para remaja, dengan kurangnya pendidikan untuk memahami dampak yang akan terjadi dalam pelyaran menangkap ikan di hari jum'at sehingga mudah terpengaruh untuk melakukannya. [61]

Sama halnya juga dengan pendapat bapak Mazli Buyung Lubis selaku mantan kepala desa Tabuyung Penyebab terjadinya pelayaran menangkap ikan di desa Tabuyung ini salah satunya adalah disebabkan karena

[61] Hasil Wawancara Deangan Bapak Rendi Selaku Masyarakat Desa Tabuyung Pada Tanggal 13 Agustus 2023

kurangnya pendidikan, terutama dalam pendidikan agama terhadap masyarakat desa tabuyung.[62]

Dari penjelasan diatas dengan ditambahi pendapat-pendapat dari masyarakat dan pelaku, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyebab terbesarnya terjadi menangkap ikan di hari jum'at adalah kurangnya masyarakat dalam pendidikan selain itu kurangnya perekonomian atau disertai kuangnya pengawasan pemerintahan desa juga merupakan suatu penyebab terjadinya pelayaran menangkap ikan di hari jum'at.

Oleh karena itu penulis memaparkan beberapa kasus pelayaran menangkap ikan di hari jum'at yang terjadi di Desa Tabuyung sebagai berikut :

No	Nama	J.k	Umur	Pendidikan	Alamat	TahunKejadian
1.	-TP	-LK	-24Thn	- SMP	Tabuyung	2022
2,	-RK	-LK	-23 Thn	- SD	Tabuyung	2020
3.	-MD	-LK	-27Thn	-SMK	Tabuyung	2022
4.	-IP	-LK	24 Thn	-SD	Tabuyung	2021

Sumber masyarakat Desa Tabuyung pada tanggal 06 Agustus 2023

Data-data masyarakat yang tercatat melakukan pelayaran menangkap ikan di hari jum'at dari hasil penelitian penulis bahwa yang menjadi permasalahan pada masyarakat Tabuyung adalah dimana segala penyebab-penyebab dari pelayaran menangkap ikan di hari jum'at itu di dasari

[62] Hasil Wawancara Dengan bapak Mazli Buyung Lubis Selaku Masyarakat Desa Tabuyung Pada Tanggal 16 Agustus 2023

karena kurangnya pengawasan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat Desa Tabuyung.

Pada umumnya masyarakat yang melanggar aturan menangkap ikan dihari Jum'at adalah masyarakat yang pendidikannya kurang, dalam artian mereka tidak terlalu menghiraukan aturan yang telah dibuat karena tidak memikirkan dampak dari aturan adat yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya seluruh masyarakat Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal adalah masyarakat asli penduduk tersebut dan hanya beberapa yang pendatang, masyarakat tersebut seperti yang sudah di bahas dalam pembahasan terdahulu yang mana mereka dalam menentukan sanksi atau hukuman bagi setiap yang melakukan pelayaran menangka ikan di hari jum'at akan dterapkan hukuman adat atau hukum secara turun temurun yaitu dengan menjatuhkan sanksi mngambil semua hasil yang didapat kapal pada hari itu.[63]

Terkait tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tabuyung yang berhubungan dengan kejahatan tindak pidana ataupun yang menyalahi moral akan diselesaikan dengan mengutamakan penyelesaiannya secara kekeluargaan akan tatepi jika tidak dapat diselesakan dengan secara kekeluwagaan maka masalah tersebut akan diselesaikan dengan hukum yang ada di indonesia.[64]

[63] Hasil Wawancara Dengan Bapak Mawardin Tokoh adat Masyrakat Desa Tabuyung 10 Pada Tanggal Agustus 2023

[64] Hasil Wawancara Dengan Bapak Razi selaku Alim Ulama Masyarakat Desa Tabuyung pada tanggal 21 Agustus 2023

Mengenai penerapan sanksi pelayaran menangkap ikan walaupun pada dasarnya lebih mengutamakan dalam penyelesaian segala perkara dengan cara kekeluargaan atau hukum secara turun - temurun,sebelum melaksanakan sanksi yang diberikan kepadan pelaku tidak lupa dalam penetapannya dilakukan musyawarah oleh tokoh adat dan tokoh agama untuk menentukan pelaksanaan setiap perkara pelayaran menangkap ikan di hari jum'at yang terjadi. Setelah diadakannya musyawarah oleh para tokoh adat dan tokoh agama maka ditetapkan hukuman bagi pelaku tindak pelayaran menangkap ikan di hari jum'at yaitu mengambil semua hasil tangkapan kapal.[65]

Hukuman adat atau praturan turun-temurun berupa wajib mengambil hasil tangkapan kapal pada hari itu adalah sebagai upaya memberikan tangung jawab kepada pelaku pelaku pelayaran menangkap ikan di hari jum'at, khususnya laki-laki agar menyelamatkan diri sendiri apa yang tidak dinginkan terjadi. Sebab bila tidak mngambil semua hasil tangkapan kapal segera, maka masyarakat akan senonoh terus menerus melakukan pelayaran menangkap ikan di hari jum'at.[66]

Perbuatan pelayaran menangkap ikan di hari jum'at berarti pekerjaan yang melanggar aturan secara terun - temurun dengan sngaja, bagi setiap warga yang melakukan pelayaran menangkap ikan di hari jum'at pada dasarnya dia telah menodai dirinya sendiri, menodai keluarga dia serta

[65] Hasil Wawancara Dengan Bapak Zia Ul Haq Selaku Kepala Desa Masyrakat Desa Tabuyung Pada Tanggal 01 Agustus 2023

[66] Hasil Wawancra Dengan Bapak Zak Selaku Alim Ulama masyarakat Desa Tabuyung pada tanggal 12 Agustus 2023

kerjaan yang mereka lakukan Cuma hanya dapat capeknya aja pada pelayaran menangkap ikan tanpa mendapatkan hasil sedikitpun dan terlebih-lebih sudah tidak menghargai aturan turun-temurun desa tersebut, dan orang yang melakukan pelayaran menangkap ikan akan dipandang buruk oleh orang lain, apalagi orang tersebut masih bujang, secara otomatis orang lain akan memandang aklaknya tidak baik, sebagai jalan keluarnya adalah mereka diwajibkan memberikan semua hasil tangkap kapal, dengan kata lain berani berbuat berani tanggung jawab.[67]

Sesuai hasil yang dilakukan oleh peneliti bahwa persoalan tersebut sudah diselesaikan cara kekeluargaan dengan menerapkan hukum turun-temurun oleh masyarakat. tokoh adat, dan tokoh agama melakukan musyawarah dengan mengahdirkan pelaku yang bersangkutan, dan dari keterangan pelaku yaitu mengatakan bahwa akhir-akhir ini keluarga mereka sedang ada masalah perekonomian yang membuat terpaksa melakukan pelayaran menangkap ikan, dan dia bergantung apa hasil musyawarah dari masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama terkait apa hukuman yang diberikan kepada sipelaku, sedangkan keterangan dari keluarga sipelaku mengatakan bahwa dia baru pertama kali melakukan hal tersebut.

Dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh masyrakat, tokoh adat, dan tokoh agama serta pelaku yang bersangkutan, maka ditetapkan hukuman bagi mereka yaitu wajib membrikan smua hasil yang didapat

[67] Hasil wawancara Dengan Bapak Puyun Selaku Masyarakat Desa Tabuyung Pada Tanggal 15 Agustus 2023

kapal. Bukan hanya untuk mereka saja akan tetapi setiap yang melakukan pelayaran menangkap ikan di hari jum'at akan diambil semua hasi yang didapat oleh kapal.

Tempat penerapan sanksi pelayaran mnangkap ikan di hari jum'at, Penerapan adalah suatu perbuatan mmpraktekan suatu teori dan metode untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang di inginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.Tempat penerapan sanksi bagi pelaku pelayaran menangkap ikan di hari jum'at yaitu di pelabuhan kapal yang dimana kapal tesebut berlabuh, maka masyarakan akan berbondong – bonding dating ketempat pelabuhan kapal tersebut, dengan mengambis semua ikan yang ada dikapal lalu di berikan ke masjid hasil tersebut.[68]

Dengan demikian pneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat desa tabuyung akan menyelesaikan malasalah pelayaran menangkap ikan dihari jum'at dengan cara menerapkan aturan secara turun – menurun dengan memberikan sanksi mengambil semua ikan atau hasil yang ada di dapat kapal tersebut.

D. Tinjauan Hukum pidana Islam Terhadap Sanksi Menangkap Ikan di Hari Jum'at di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis

Hukum pidana Islam disebut sebagai *jarimah*, dalam *jarimah* terdapat berbagai macam sansksi tindak pidana dari awal hukuman ringan sampai hukuman berat itu terdapat aturan yang mengaturnya. Banyak contuh *jarimah*

[68] Hasil Wawancara Dengan bapak Eko Selaku Masyarakat Desa Tabuyung Pada Tanggal 23 Agustus 2023

berat dan humannya pun berat yaitu membunuh, membegal dan lain sebagiannya dan hukum yang mengaturnya kalau dalam islam itu sumbernya dari al-qur'an dan hadist.[69]

Penerapan hukum pidana Islam dalam rangka menyelamatkan manusia baik individual maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan.[70] Hukuman yang diartikan dengan pidana, siksaan atau ganti rugi merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang dan melanggar aturan.[71]

Ulama Fiqh mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tidak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Hukuman itu disyari'atkan

   Sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syari'at Islam. Perbuatan dianggap salah jika ditentukan oleh nas. Hal ini didasarkan pada sumber-sumber shara' seperti al-Qur'an, alSunnah, ijma', atau Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri). Prinsip ini yang dalam bahasa hukum disebut dengan istilah asas legalitas.

2. Hukuman itu bersifat pribadi

   Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana hanya dipundak pelakunya, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kecuali dalam masalah diyat, pembebanan (ganti rugi) dapat ditanggung

---

[69] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, Jakarta,* Sinar Grafika, 2009. hlm 34.

[70] Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Surabaya, Pustaka Idea, 2016, hlm 85.

[71] Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Surabaya,UIN Sunan Ampel,Press, 2014, hlm 116.

oleh keluaganya. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang bersalah.

3. Hukuman bersifat universal

Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan dinmuka hakim berlaku sama derajatnya, tanpa membedakan apakah itu orang kaya atau miskin, rakyat atau penguasa Sehingga dalam *jarimah qisas* bila pelakunya sekalipun penguasa dikenakan hukuman pula. Adapun dalam hukuman *ta'zir*, persamaan dalam jenis dan kadar hukuman tidak diperlukan. Persamaan yang dituntut dari hukuman *ta'zir* itu adalah persamaan dalam aspek dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah mendidik, dan memperbaikinya.[72]

Hukuman bagi pelaku *jarimmah* sengaja berbuat pidana tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an Maupun Hadis. Bagaimana hukum Islam menyikapi persoalan ini akan menjadi pembahasan dibab ini. Dalam hukum Islam pengertian tindak pidana pelayaran tidak akan ditemukan, karena tindak pidana pelayaran ini merupakan suatu yang baru. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku tindak pidana dengan sengaja adalah *ta'zir.* Sebab dalam tindak pidana ini ditemukan adanya unsur kesengajaan dari nahkoda yang tidak melarang awak kapalnya melayarkan kapal dalam keadaan tidak

[72] Ibid hlm., 92.

laiklaut. Suatu tindakan dapat dikatakan sengaja bila memiliki tiga unsur, antara lain, Unsur Formal, Unsur Material, dan Unsur Moril.[73]

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya hukum adalah untuk melindungi masyarakat dan memberi efek jera baik dalam masyarakat atau diri pelaku itu sendiri dan dalam memberikan hukuman harus memenuhi syarat-syarat dari sebuah hukuman. Tindakan pelaku termasuk dalam *jarimah ta'zir* berkaitan dengan harta serta *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum dan hukumannya *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan.

Disini penulis menyimpulkan bahwa jika di tinjau dari Hkum Pidana Islam sanksi yang di berikan kepada sipelaku terhadap sanksi pelayaran menangkap ikan di hari jum'at adalah *jarimah ta'zir*, yang dimana *jarimah ta'zir* tersebut berupa bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan walliyul amri atau hakim. Menurut Ahmad Wardi Muslich, *ta'zir* juga merupakan jarimah. *Jarimah ta'zir* adalah jarimah yang sebagian terbesar jarimah nya dan seluruh sanksinya ditentukan penguasa. Namun ada sebagian kecil *jarimah ta'zir* yang ditentukan syara' walaupun dalam hal hukuman diserahkan kepada kebijakan pemerintah. Ta'zir merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlahnya belum ditentukan oleh syara' yaitu Alqur'an dan Hadits.

Terdapat dalam hadits yang menjelaskan tentang ta'zir :

[73] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm 22.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: "*jika di antara kamu melihat kemungkaran maka ubalah dengan tanganmu, dan jika kamu tidak cukup kuat untuk melakukannya, maka gunakanlah lisan, jika kamu masi tidak cukup kuat, maka ingkarilah dengan hatimu karena itu adalah selemah-lemahnya iman."(*HR Muslim).

Dikalangan para ahli hukum Islam juga dikenal dengan adanya sanksi denda dalam *ta'zir* ini. Biasanya *ta'zir* digunakan sebagai hukuman pokok dan hukuman tambahan. Namun demikian para ulama tidak menentukan batas tertinggi dan terendah dalam sanksi *ta'zir* berupa harta ini. Hal ini merupakan lapangan ijtihad bagi ulil amri (pemerintahan atau penguasa) untuk menentukannya.

Meskipun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa jarimah yang berkaitan dengan harta dapat dijatuhkan hukuman penjara. Sanksi denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan sanksi. lainnya, hanya saja dalam syariat Islam tidak menentukan batas tertinggi dan terendah bagi hukuman denda ini dan hal ini diserahkan kepada hakim sesuai dengan keadilan dan tujuan pemberian hukuman denda dengan mempertimbangkan jarimah - jarimah , pelaku, dan kondisinya.[74]

[74] A.Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) , (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 212-213.

E. Menangkap Nilai-nilai Larangan Ikan di Hari Jum'at

Dalam peraturan secara turun temurun di desa tabuyung memiliki beberapa nilai-nilai di dalam aturan tersebut :

1. Biota Laut

   Supaya semua organisme yang ada di laut baik seperti ikan, ruput laut, dan lain-lain dapat berkembang biak pada hari itu.

2. Masyarakat

   Supaya masyarakat desa tabuyng terutama bagi kaum laki-laki dapat melaksanakan kewajiban shalat jum'at, dan menghidari hal;hal yang tidak di inginkan jika ada yang melakukan pelayaran menngkap ikan di hari jum'at, sebab jika terjadi apa yang tidak di inginkan maka tidak ada yang bisa membantunya dikarenakan semua masyarakat desa tabuyung banyak yang tidak melakukan pelayaran untuk melaksanakan shalat jum'at pada hari tersebut.[75]

Disini penulis dapat menyimpulkan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam aturan turun temurun di desa tabuyung adalah memiliki banyak manfaat baik dari segi keselamatan diri sendiri, keslamatan ibadah atau agama, dan serta memelihara alam supaya terjaga lingkungannya.[76]

Adapun firman Allah dalam Q.S al-munafiqun ayat 9 menjelaskan tentang agama dan harta benda :

[75] Hasil Wawancara Dengan Bapak Zul Kipli Selaku Tokoh Masyrakat Desa Tabuyung Pada Tanggal 08 Agustus 2023

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلۡهِكُمۡ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ٩

Artinya *: wahai orang-orang beriman, janganlah harta bendamu dan anak anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian mereka itulah orang-orang merugi.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam mengenai sanksi aturan turun temurun terhadap pelaku tindak pidana pelayaran menangkap ikan di hari jum'at dalam perspektif Hukum Pidana Islam di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada dasarnya lebih mengutamakan dalam penyelesaian segala perkara dengan cara kekeluargaan atau hukum secara turun - temurun, tidak lupa dalam penetapannya dilakukan musyawarah oleh tokoh adat dan tokoh agama untuk menentukan sanksi setiap perkara yang terjadi. seperti perkara tindak pidana pelayaran menangkap ikan di hari jum'at, para tokoh adat dan tokoh agama melakukan musyawarah dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pelayaran menangkap ikan di hari jum'at. Hukuman bagi pelaku tindak pelayaran menangkap ikan di hari jum'at adalah mengambil semua hasil tangkapan kapal.
2. Bahwa jika di tinjau dari Hukum Pidana Islam sanksi yang di berikan kepada sipelaku terhadap sanksi pelayaran menangkap ikan di hari jum'at adalah jarimah ta'zir, yang dimana jarimah ta'zir tersebut berupa bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan walliyul amri atau hakim. Menurut Ahmad Wardi Muslich, ta'zir juga merupakan jarimah. Jarimah ta'zir adalah jarimah

yang sebagian terbesar jarimah nya dan seluruh sanksinya ditentukan penguasa. Namun, ada sebagian kecil jarimah ta'zir yang ditentukan syara' walaupun dalam hal hukuman diserahkan kepada kebijakan pemerintah.

3. Nilai-nilai yang terdapat dalam aturan larangan pelayaran menangkap ikan di hari jim'at di Desa Tabuyung adalah memiliki banyak manfaat baik dari Biota Laut dan Masyarakat. Adapun manfaat bagi biotalaut Supaya semua organisme yang ada di laut baik seperti ikan, ruput laut, dan lain-lain dapat berkembang biak pada hari itu. Begitu sebaliknya untuk masyrakat Supaya masyarakat Desa Tabuyng terutama bagi kaum laki-laki dapat melaksanakan kewajiban shalat jum'at, dan menghidari hal;hal yang tidak di inginkan jika ada yang melakukan pelayaran menngkap ikan di hari jum'at, sebab jika terjadi apa yang tidak di inginkan maka tidak ada yang bisa membantunya dikarenakan semua masyarakat Desa Tabuyung banyak yang tidak melakukan pelayaran untuk melaksanakan shalat jum'at pada hari tersebut.

B. Saran

1. Bagi tokoh agama dan tokoh adat supaya menuliskan peraturan tentang larangan menangkap ikan di hari Jumat tersebut.
2. Kepada Pemerintah desa Tabuyung supaya memsosialisasikan larangan yang telah dibuat mengenai permasalahan menangkap ikan di hari Jumat.

3. Bagi masyarakat supaya mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh tokoh adat.

DAFTAR PUSTAKA

Akir Ari Purwanto et.al,"Perbedaan Umpan Terhadap Hasil Tangkapan Udanggalah (Macrobracrium Idea) Alat Tangkap Bubu Bambu (Icir) Di Perairan Rawapening", Journal of Fisheries Resoourses Utilization Management and Technology volume 3, Nomor 2, Tahun 2003.

Ayodyoa , *Lokasi Dan Fasilitas Pelabuhan*. (Bogor : Bagian Penangkapan Ikan Institut Pertanian Bogor, 1975).

Hayward, *Biologi and epidemiology of bacterial wilt caused by pseudomonas solanacearum*.(Ann.Rev. of Phytopathol., 1991).

Surain, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia,Bandung*, Yrama Widya.

Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqih*, Yayasan Al-ahkam, Makasar, 2002.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran, Pasal 1, Ayat 1.

Skripsi,Nur Asfina Zahara,tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pelayaran yang dilakukan oelh nelayan pencari ikan,fakultas hukum universitas muhammadiyah Sumatra utara,medan ,tahun 2022.

Irwandi. Syahputra. *Modul Tindak Pidana Kelautan.* (Tanjung Pinang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ahli Haji, 2020).

Subekti dan Tjtrosudibio, 1983. *Kitab Undang–Undang Hukum Dagang dan Undang–Undang Kepailitan*, Perdanya Paramita, Jakarta.

https://www.psychologymania.com/2013/05/pengertian-nelayan.html

Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara persada Utama,2018) UU NO 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Sri Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: suatu pendekatan komparasi, Jurnal Adminitrasi Pemerintahan Vol 2 Issue 1 (2019).

Samsul Ramli dan Fahrurrazi, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014.

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Skripsi, St Nurhalizah.Hs,Analisis Daerah Penangkapan Ikan Pada Pengoperasian Rawai Dasar Di Perairan Bulukumba Sulawesi Selatan, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar Tahaun 2021.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakatra: PT. Raja Grafindo, 2006.

A.Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) , (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000.

Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium*, Vol 5, No. 9, Januari-Juni 2009.

Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,1990).

Keiko Hauriza Setiawan dan Dyah Setyorini, Jurnal Analisis Yuridis Penangkapan Ikan Tanpa Siup Dan Sipi Oleh Kapal Berbendera Asing, Vol. 4 No. 5 2022.

Siska Amelya dan Fitri Elfiani, jurnal Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Of Juridische Analyse.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 28A.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 245, Ps. 1 ayat (5) dalam Pasal 27 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, Jakarta,* Sinar Grafika, 2009.

Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam,* Surabaya, Pustaka Idea, 2016.

Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam,* Surabaya,UIN Sunan Ampel,Press, 2014.

Sulwafiani, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perikanan, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.

LAMPIRAN

DAFTAR NAMA WAWANCARA

Hasil Wawancara Dengan Ibuk Rasnawati Selaku Msayarakat Desa Tabuyung Pada Tanggal 02 Agustus 2023

Hasil Wawancara Bersama Tokoh Adat Masyarakat Desa Tabuyung Bapak Mawardin Pada tanggal 31 juli 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak zul kipli sebagai Tokoh masyarakat Desa Tabuyung, pada tanggal 01 agustus 2023.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Arif Selaku Kasi Pelayanan Desa Tabuyung Pada Tanggal 01 Agustus 2023

Hasil wawancara dengan bapak Ifin selaku masyarakat Desa tabuyung pada tanggal 4 agustus 2023

Hasil Wawancara dengan bapak Pudan selaku masyarakat Desa Tabuyung pada tanggal 6 Agustus 2023

Hasi wawancara dengan bapak Nabawi Selaku BPD desa tabuyung pada tanggal 10 Agustus 2023.

Hasil Wawancara dengan bapak Andi selaku masyarakat Desa Tabuyung Pada tanggal 06 Agustus 2023.

Hasil wawancara dengan bapak Edon selaku masyrakat Desa Tabuyung pada tanggal 06 Agustus 2023.

Hasil wawancara deangan bapak Rahmat selaku masyarakat Desa Tabuyung pada tanggal 08 Agustus 2023

Hasil wawancara deangan bapak rizal selaku masyarakat Desa Tabuyung pada tanggal 07 Agustus 2013

Hasil Wawancara Dengan Bapak Redo Selaku Masyarakat Desa Tabuyung Pada Tanggal 13 Agustus 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Sandi Selaku Masyarakat Desa Tabuyung Pada Tanggal 14 Agustus 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Eri Selaku Masyarakat Desa Tabuyung Pada Tanggal 15 Agustus 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Ilham Selaku Masyarakat Desa Tabuyung Pada Tanggal 12 Agustus 2023

Hasil Wawancara Deangan Bapak Rendi Selaku Masyarakat Desa Tabuyung Pada Tanggal 13 Agustus 2023

Hasil Wawancara Dengan bapak Arpin Selaku Masyarakat Desa Tabuyung Pada Tanggal 16 Agustus 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Limu Selaku Alim Ulama Masyrakat Desa Tabuyung 10 Pada Tanggal Agustus 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Razi selaku Alim Ulama Masyarakat Desa Tabuyung pada tanggal 21 Agustus 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Zia Ul Haq Selaku Kepala Desa Masyrakat Desa Tabuyung Pada Tanggal 01 Agustus 2023

Hasil Wawancra Dengan Bapak Zak Selaku Alim Ulama masyarakat Desa Tabuyung pada tanggal 12 Agustus 2023

Hasil wawancara Dengan Bapak Puyun Selaku Masyarakat Desa Tabuyung Pada Tanggal 15 Agustus 2023

Hasil Wawan Cara Dengan Bapak Darusman Selaku pemuda Masyarakat Desa tabuyung Pada tanggal 06 Agustud 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Riko selaku masyarakat Desa Tabuyung Pada Tanggal 14 agustus 2023

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa nilai-nilai yang terdapat di peraturan secara turun temurun Desa Tabuyung ?
2. Bagaimana sanksi menangkap ikan di hari jum'at di Desa Tabuyung ?
3. Bagaiman sejarah Desa Tabuyung kecamatan Muara Batang Gadis ?
4. Apa penyebab pelayaran menangkap ikan di hari jum'at ?
5. Bagaimana demografis Desa Tabuyung ?
6. Bagaimana penerapan atau pelaksanaan sanksi pelayaran menangkap ikan dihari jum'at ?
7. Bagaimana pandangan Masyarakat Terhadap Sanksi yang ditetapkan kepada pelaku pelayaran menangkap ikan di hari jum'at ?
8. Seberapa banyak yang melakukan pelayaran menangkap ikan di hari jum'at sampai saat ini ?

DOKUMENTASI






INDONESIA
INDONESIA







